



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 105/KEP/2009

TENTANG

FORUM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN (PKHP)
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa persoalan mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, disamping masih adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi terhadap perempuan;
 - b. bahwa masih terdapat kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat;
 - c. bahwa masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik, serta sosial budaya dan lingkungan yang kurang responsif gender;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Merencanakan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama lintas sektor terkait, organisasi sosial, dan keorganisasian keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pusat Studi Wanita di wilayahnya;
 2. Melakukan koordinasi dalam rangka meningkatkan keterpaduan program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia, sosial budaya dan lingkungan;
 3. Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di unit masing-masing;
 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan menganut asas kesetaraan, kebersamaan dan demokrasi, serta dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak lain yang diperlukan.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dibantu Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Apabila dipandang perlu, atas usulan dari Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan maka keanggotaan Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dapat diubah atau diganti.

- KEENAM : Perubahan atau penggantian keanggotaan Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2009 Cq. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2009.

Ditetapkan di Yogya
pada tanggal 29 Juni 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 3. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di Jakarta;
 4. Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS di Jakarta;
 5. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
 6. Bupati dan Walikota se-Provinsi DIY;
 7. Inspektur Inspektorat Provinsi DIY;
 8. Kepala BAPPEDA Provinsi DIY;
 9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
 10. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY;
 11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
 12. Seluruh anggota Forum;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 105/KEP/2009
 TANGGAL 29 Juni 2009

SUSUNAN DAN PERSONALIA FORUM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
 PEREMPUAN (PKHP) DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	JABATAN DALAM FORUM	NAMA	UNIT KERJA/ORMAS
I	Pelindung	Hamengku Buwono X	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
II	Penasehat	GKR Hemas	Kraton Kilen
III	Ketua	Dra. Siti Munawaroh, Apt, M.Kes	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY
IV	Sekretaris	Drs. YB. Jarot Budiharjo	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY
V	Bidang Pendidikan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Siti Nuril Hidayah 2. Lintang Ikamayuda, S.Sos 3. Sumarna, S.Sos 4. DAS Salirawati, M.Si 5. Ninik Sri Rahayu, SE, MM 6. Niken Herminingsih, S.Pd, M.Hum 7. Ani Windarti 8. Dra. Yoni Astuti, M.Kes 9. Sutrisnowati, SH 	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi DIY Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DIY BAPPEDA Provinsi DIY Pusat Studi Wanita UNY Pusat Studi Wanita UII Yogyakarta Pusat Studi Wanita UGM Yogyakarta Pusat Studi Wanita UAD Yogyakarta Pusat Studi Wanita UMY Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA)
VI	Bidang Kesehatan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nunik Endang Sunarsih, Amd, Keb., S.IP 2. Endang Iriana Pujiastuti, SH 3. Tuti Handayu, SKM 4. dr. Wiwit Widiastuti, M.Kes 5. Drs. Irawan Jatmiko, M.Si 6. Sri Sumiyati, SH 7. Mukhotib MD, S.Ag 8. Darmawanti Burhan, S.Si.T, Spd 	Dinas Kesehatan Provinsi DIY BKKBN Provinsi DIY Rumah Sakit Ghrasia Provinsi DIY Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul Perkumpulan Keluarga Berencana (PKBI) Provinsi DIY Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi DIY
VII	Bidang Ekonomi :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tri Murtiningsih, SH 2. Ir. Pratami Setyaningsih 3. Purina Yoga Raharjanti, ST, MM 4. C. Retno Kusharjanti, SP, MT 5. Dra. Anik Setyarini, SP, M.Si 6. C. Rini Puspitasari, SP, M.Si 7. Dra. Is Cahyawati 8. Dra. Nuri Tri Harjun 9. Ir. Hj. Asyantini, MM 10. Halida R. Kusumaharta 	Dinas PERINDAGKOP Provinsi DIY Dinas Pertanian Provinsi DIY Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY BAPPEDA Kabupaten Sleman Bagian Kesra Kabupaten Sleman TP-PKK Provinsi DIY TP-PKK Provinsi DIY IWAPI Yogyakarta

NO	JABATAN DALAM FORUM	NAMA	UNIT KERJA/ORMAS
VIII	Bidang Politik Perempuan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nunik Arzakiyah, S.Si, MT 2. Suryantinah, BA, SIP, MM 3. Rr. Sisilia Sulistyaningsih, SH 4. Noeryati, BCHK 5. Dra. Elly Karyani Sulistyawati 6. Retno Agustin 7. Renny A. Frahesty 	<p>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY</p> <p>Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY</p> <p>BAPPEDA Kota Yogyakarta</p> <p>Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta</p> <p>Kaucus Politik Perempuan Indonesia (KPPI)</p> <p>Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)</p> <p>Serikat Bersama Perempuan Yogyakarta (SBPY)</p>
IX	Bidang Hukum dan HAM :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Any Nurul Aini, SH 2. Florentina Sri Haryanti, S.Sos 3. Triyanto Raharjo, S.Sos, M.Si 4. Dra. Siti Muqodimah 5. Amin Muftiyah 6. Dra. Endang Komarinah 7. Rofiqoh Widiastuti, MPH 	<p>Kanwil Depag Provinsi DIY</p> <p>Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY</p> <p>BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo</p> <p>Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo</p> <p>Yasanti</p> <p>Lembaga Perlindungan Anak (LPA)</p> <p>Rifka Annisa</p>
X	Bidang Sosial Budaya dan Lingkungan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. drg. Retno Nurmawati, M.Kes 2. Sri Mulhayati P, SSn 3. Nur Ikhwan Rahmanto, S.Ant 4. Barul Budiati, SE 5. Drs. Sularso 6. Darwatiningsih, M.Si 7. Dra. Suprihastuti 8. Halimah Ginting, SH 9. Hj. Chayatun S, SH 	<p>Dinas Sosial Provinsi DIY</p> <p>Dinas Pariwisata Provinsi DIY</p> <p>Dinas Kebudayaan Provinsi DIY</p> <p>Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY</p> <p>Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY</p> <p>BAPPEDA Kabupaten Bantul</p> <p>Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>WALHI Yogyakarta</p> <p>BK3S Provinsi DIY</p>

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X